

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BIDANG  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITENGAH GEJOLAK  
TURBULENSI KEUANGAN DESA  
(Studi Kasus Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una  
Una)**

**Wisra\*, Siti Aminah H. Karim\*, Rosida P. Adam\*, Suardi, Nurfia\*, Sulvia Verawaty\***

**ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengetahui masalah yang ada yang memungkinkan pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Phenomenology-Hermeneutics yang digunakan untuk menemukan makna dan sifat pengalaman dari narasumber. Desa Buntongi, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una Una adalah objek kegiatan penelitian ini dengan informan dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara Desa, Kepala Pemerintahan, BPD dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal ke kepala kecamatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa khususnya penyerapan belanja di bidang Pemberdayaan Masyarakat belum berjalan dengan baik.*

**Kata kunci:** manajemen, phenomenology, hermeneutics, pemberdayaan masyarakat,

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to describe the management of village funds in community empowerment and find out the problems that exist so that it allows management of village funds is not going well. This study uses a descriptive qualitative method with the Phenomenology-Hermeneutics approach which is used to find the meaning and nature of the informant's experience. Buntongi Village, Ampana District, Tojo Una Una Regency is the object of this research activity with informants from the Village Head, Secretary, Village Treasurer, Head of Government, BPD and the community. The results showed that the management of village funds was recorded vertically to the sub-district head, so we conclude that the management of village funds especially the absorption of spending in the field of Community Empowerment has not been carried out properly.*

**Keywords:** Management, Phenomenology, Hermeneutics, Community Empowerment

## PENDAHULUAN

Pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan regulasi desa dapat menjadi sebuah tekanan yang akan mempengaruhi persepsi dan motivasi yang berimplikasi pada output dan outcome kinerja pengelola keuangan desa, oleh karena itu diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin (Bagire dan Namada, 2013). Yang diperlukan dalam rangka menjaga dan mengedepankan kekompakan dan kesadaran seluruh anggota tim dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (Alemu, 2016; Guo, Dai & Yang, 2016) meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan kondisi tersebut (Cole, Bruch, & Walter, 2008).

Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018, selanjutnya untuk belanja bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini berdasarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una No.2 Tahun 2018. Mekanisme pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa

disesuaikan dengan prioritas program yang telah ditetapkan pemerintah desa.

Berdasarkan Penelitian kami sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa pengelolaan dana desa di desa Buntongi masih terdapat banyak kesalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan desa. masih kurangnya komunikasi diantara lembaga desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, kurangnya sumber daya yang mendukung pengelolaan keuangan desa mulai dari sumber daya manusia, sarana dan pra sarana, struktur birokrasi yang kurang mampu menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan lebih efisien.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.. Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

### 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun (2015:81) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa

satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

### 3. Konsep Pengelolaan Dana desa

Salah satu prinsip pengelolaan alokasi dana (Lapananda, 2016), yaitu ‘Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum.

### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Definisi pemberdayaan menurut Djohani (dalam Haryono, 2012:49) mengatakan bahwa pola dasar gerakan pemberdayaan mengamanatkan perlunya power dan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya, oleh karena itu pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (Power) kepada pihak yang lemah (powerless) dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerfull) sehingga terjadi keseimbangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan rincian yang utuh terkait fenomena turbulensi keuangan dalam pengelolaan dana desa, pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah fenomenologi-hermeneutika (Ricoeur,2014) konsep ini merupakan perpaduan antara ilmu dan filsafat.

Desa Buntongi Kecamatan Ampa Kota Kabupaten Tojo una una merupakan objek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa desa buntongi selain sebagai desa

yang baru terbentuk dari pemekaran desa sansarino,juga merupakan desa yang sangat banyak penduduk miskinnya sedangkan kualitas fasilitas umum yang kurang memadai.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses simultan atau learning by doing, yang mana temuan data dilapangan akan didiskripsikan tentang apakah yang dialami, dipahami dalam fenomena. Strategi utama untuk menjaga keabsahan data dengan melakukan triangulasi data. (Gamar dan Jamhuri 2015) mengemukakan bahwa triangulasi data diperoleh dari ketekunan dalam pengamatan,membangun keterlibatan yang empatik serta memberikan penjelasan suatu peristiwa yang dilihat,didengar dan dirasakan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gejolak Turbulensi keuangan desa terjadi karena adanya perubahan regulasi desa sehingga dapat menjadi sebuah tekanan yang akan mempengaruhi persepsi dan motivasi yang berimplikasi pada *output* dan *outcome* kinerja pengelolaan keuangan desa. Adanya kluster data per wilayah dapat menganalisis sistem keuangan regional secara kompherensif dan mengidentifikasi potensi *regional imbalances* yang dapat terjadi, dikarenakan kompleksitas sector keuangan antar regional serta kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri, sehingga menimbulkan resiko yang berbeda-beda (unik) setiap wilayah. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan dan akan dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian langsung dilapangan dapat dilihat bahwa perencanaan program meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dari dana desa,,masyarakat belum terlibat aktif, masyarakat diundang ke musyawarah perencanaan dan pembangunan desa namun usul kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa. Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa, keluaran pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut adalah berupa sebuah dokumen dalam bentuk peraturan desa (PerDes). Pengelola keuangan dana desa dituntut memiliki kemampuan untuk memprediksi, memperhitungkan dan menyusun beberapa aspek dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan desa. Penyimpangan akibat tekanan (*pressure*) bagi pemerintah desa buntongi dalam menyusun dokumen perencanaan desa.dalam penelitian ini tekanan yang diterima kepala desa adalah tekanan dari DPMD yang mengharuskan kepala desa menyampaikan RPJMDesanya, sementara itu minimnya pengetahuan dan pemahaman dari sumber daya aparatur yang ada serta petunjuk teknis juga menjadi tekanan dalam internal pengelola keuangan desa sehingga dokumen perencanaan yang disusun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kegagalan yang terjadi disebabkan pendekatan pembangunan pembangunan dilaksanakan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat marjinal yang tersebar didesa,disamping itu terjadinya kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang berlebihan dengan mengejar target pendapatan daerah yang terkadang menimbulkan pelanggaran norma-norma

masyarakat dipedesaan, dalam perencanaan pembangunan terutama pada sector pengembangan dilakukan bersifat *topdown planning* yang menempatkan masyarakat sebagai objek dan bukan sebagai subjek (pelaku),setiap Pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat,karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri.

### **Implementasi Pengelolaan Dana Desa di desa Buntongi kecamatan Ampana Kota**

Sesuai dengan Perbup No.9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan keuangan desa tanggal 10 mei 2017, menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat, penelitian ini terprioritas pada bidang Pemberdayaan masyarakat, yakni:

**Tahap Perencanaan**Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan,bila perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan.kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa bidang Pemberdayaan di desa buntongi masih beluk terlaksana secara maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat Hal ini dapat dilihat dari:

1. Tidak adanya komitmen kepala desa untuk melibatkan masyarakat secara optimal.
2. Tidak adanya pemahaman warga masyarakat terhadap ketentuan maupun teknis penyusunan APBDesa.
3. Pembahasan rancangan APBDesa yang seharusnya dilakukan secara terbuka,dihadiri hanya pada perangkat desa.

4. Belum optimalnya rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang membutuhkan pendanaan secara wajar.

Ketersediaan dana desa Buntongi bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2018 sebesar Rp. 211.371.600, - atau 25,5% dari jumlah Dana desa secara otomatis mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp.255.195.000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah dana yang tersedia tersebut belum sepenuhnya dapat memecahkan masalah social yang ada dalam masyarakat dalam hal peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat pada khususnya yang mana masyarakat miskin akan tetap menjadi miskin, oleh karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk tindakan yang lebih nyata dan rasional sehingga dapat menjadi saluran 'Input Ide' dalam tahap Perencanaan (Razak, Ludigdo, Sukoharsosno dan Toyyib, 2011).

### **Tahap Pelaksanaan**

Setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci selanjutnya akan dilaksanakan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan. Melalui *musrenbangdes* pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan telah sah dan siap diimplementasikan. Kepercayaan masyarakat yang kurang kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan dana desa menjadi unsur negatif yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak maksimal karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Hal ini disebabkan karena ketidakterbukaan atau transparansi secara

nyata terhadap penggunaan dana desa. Secara fakta dilapangan masyarakat berdalih bahwa yang mengetahui penggunaan dana desa yang telah memenuhi syarat untuk sebuah kegiatan hanya perangkat desa, masyarakat awam tidak mengetahui program standar pelaksanaannya dengan persaksian bahwa perencanaan yang telah dibuat diprioritaskan pada yang terpenting. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa realisasi pelaksanaan program pemerintah secara nasional di desa Buntongi bidang Pemberdayaan masyarakat, yakni:

1. Pemberdayaan Masyarakat bentuk fisik, dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana,serta Infrastruktur pertanian belum sepenuhnya terpenuhi, sedangkan untuk pembangunan dan penyediaan air bersih, dimana kondisi masyarakat setempat masih memanfaatkan air sungai untuk dikonsumsi, sehingga mengakibatkan pencemaran air meningkat, serta menurunnya kualitas air sungai sangat memberi dampak baru dalam kehidupan masyarakat terutama warga yang ada di RT 6 dengan jumlah 30 KK yang tinggal di area pegunungan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik, salah satunya pembentukan usaha ekonomi masyarakat (satu produk unggulan) khusus didesa buntongi belum terlaksana secara menyeluruh dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya kecakapan dan koordinasi dari aparat desa kepada masyarakat khususnya petani. sehingga proses

pendistribusian hasil pertanian masih dikelola secara mandiri.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Tidak terintegrasinya pertanggungjawaban Dana Desa di desa Buntongi dengan APBDesa, sehingga pertanggungjawabannya harus dibuat terpisah dengan laporan LPPD. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada Bupati melalui Camat. Adapun untuk pembuatan atau penyajian laporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan masih menggunakan bantuan pihak ketiga. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum ada pertanggungjawaban kepada masyarakat secara nyata seperti apa hasil dari dana desa tersebut, guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa**

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang sifatnya mendukung maupun menjadi penghambat proses pengelolaan dana desa, sebagai faktor pendukungnya adalah adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah berupa peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una Una, dukungan sosialisasi yang merupakan proses penyampaian kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan dan dukungan sarana dan prasarana yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan serta penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber

daya manusia yang ada di Desa Buntongi minimnya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki terbukti dengan adanya pengeluaran tambahan untuk dikerjakan oleh pihak ketiga. Kurangnya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan suka rela mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi dari program tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Gejolak turbulensi keuangan desa yang terjadi karena adanya perubahan regulasi desa sehingga dapat menjadi sebuah tekanan yang akan mempengaruhi persepsi dan motivasi yang berimplikasi pada output dan outcome kinerja pengelolaan keuangan desa. sehingga berpengaruh pada tahap perencanaan dana desa yang dilakukan dengan musrenbangdes dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, namun penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih didominasi oleh perangkat desa. Sedangkan untuk implementasi pengelolaan dana desa secara nyata khususnya bidang Pemberdayaan masyarakat belum terlaksana secara maksimal dan perlu dijadikan perhatian khusus dalam memenuhi sasaran dan tujuan dari program kerja RKPDesa guna mensejahterakan taraf kehidupan masyarakat miskin di desa buntongi, secara konseptual pemberdayaan masyarakat sesungguhnya yaitu upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian melalui empat aspek yaitu, aspek perlindungan social, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi local

dan terpenting bagaimana mengadaptasi konsep tersebut kepada masyarakat.

### Saran

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu pola pembinaan pembangunan desa yang tepat sasaran, sehingga anggaran desa yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu pola pembinaan desa yang cukup efektif adalah dengan menggunakan status tipologi desa dan indeks komposit pendukungnya sebagai bahan pertimbangan pengalokasian keuangan dana desa.

Bahwa Perlibatan masyarakat desa dalam menyusun dokumen perencanaan desa turut mempengaruhi arah kebijakan dalam pembangunan jangka menengah desa.

Sebagai upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di desa buntongi melalui bidang Pemberdayaan masyarakat kami menyarankan sistem pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha sosial, antara lain menjadi penyalur hasil produksi masyarakat, memberikan pelatihan untuk menambah kemampuan dan wawasan serta menggerakkan aksi sosial, bahwa aksi sosial berjalan efektif dan massif jika pemberdayaan masyarakat juga dilakukan secara efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

Bagire, V., & Namada, J.M. 2013. *Managerial skills, Financial Capability and strategic planning in*

*organizations*. American Journal of industrial and business management, vol. 3 (Sept), 480-487.

Chwastiak, M. 2013. *Profiting from destruction: The Iraq Reconstruction, Auditing and Management of Fraud*. Critical Perspectives on accounting, vol. 24 (1), pp: 32-43. <http://doi.org/10.1016/j.cpa.2011.11.9>.

Cole, M.S., Bruch.H., & Walter.F. 2008. *Affective Mechanisms linking Dysfunctional behavior to Performance in Work Teams: A Moderated Mediation Study*. Journal of applied psychology, vol. 93 (5), pp: 945-958.

Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Penerbit PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta.

Razak, Ludigdo, Sukoharsosno dan Toyyib. 2011. *Jurnal umum tahap perencanaan*.

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Pualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Siti Aminah Karim, Mahmud Lahay, Zulfan 2018. *Pengaruh kompetensi aparat desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (Desa Buntongi Kec.Ampana Kota Kab.Tojo Una Una)*.

\*Dosen SKU Universitas Tadulako  
(Email: Wisra2019@gmail.com)